

## ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang BUMN Tahun 2025, khususnya Pasal 4B, menimbulkan persoalan hukum terkait pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara. Norma tersebut menegaskan bahwa keuntungan maupun kerugian BUMN merupakan domain korporasi, sehingga berpotensi mengaburkan kedudukan kerugian negara sebagai unsur esensial dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan hukum yang muncul adalah adanya konflik norma antara UU BUMN Tahun 2025 dengan rezim hukum keuangan negara dan UU Tipikor, serta implikasinya terhadap pembuktian unsur “kerugian keuangan negara” dalam perkara korupsi.

Pemeriksaan dokumen dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU BUMN Tahun 2025, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Tipikor, serta didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Analisis juga menggunakan asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali* dan penafsiran sistematis untuk mengidentifikasi konflik norma serta menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam menyelesaikan disharmonisasi regulasi tersebut.

Hasil pendapat hukum menunjukkan bahwa Pasal 4B tidak dapat dimaknai secara absolut karena bertentangan dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, kerugian BUMN tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Untuk itu, diperlukan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 4B, reformulasi norma guna menghindari multitafsir, serta konsistensi aparat penegak hukum dan peradilan dalam menerapkan asas *lex specialis* agar efektivitas pemberantasan korupsi tetap terjaga.

Kata Kunci: BUMN, Konflik Norma, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

The enactment of the 2025 State-Owned Enterprises (SOEs) Law, particularly Article 4B, has given rise to legal issues concerning the separation of SOE losses from state losses. This provision stipulates that both profits and losses incurred by SOEs fall within the corporate domain, thereby potentially obscuring the status of state losses as an essential element of corruption offenses. The legal issue lies in the normative conflict between the 2025 SOEs Law and the legal regimes governing state finance and anti-corruption law, as well as its implications for proving the element of “state financial loss” in corruption cases.

This study employs a normative legal research approach through an examination of relevant legislation, namely the 2025 SOEs Law, the State Finance Law, the State Treasury Law, and the Anti-Corruption Law, supported by the jurisprudence of the Constitutional Court. The analysis also applies legal principles such as *lex specialis derogat legi generali* and systematic interpretation to identify normative conflicts and determine the appropriate legal framework for resolving regulatory disharmony.

The legal opinion concludes that Article 4B cannot be interpreted in an absolute manner because it contradicts the Constitutional Court’s constitutional interpretation, which affirms that separated state assets invested in SOEs remain part of state finances. Accordingly, losses suffered by SOEs may still be classified as state losses in the context of corruption offenses. Therefore, a conditional constitutional interpretation of Article 4B is required, along with a reformulation of the provision to prevent multiple interpretations and ensure consistency among law enforcement agencies and the judiciary in applying the principle of *lex specialis*. Such measures are necessary to maintain the effectiveness of anti-corruption efforts.

**Keywords:** *State-Owned Enterprises (SOEs), Normative Conflict, State Losses, Corruption Offenses.*